



Laporan Keanggotaan PT. 168 Benoa dalam Seafood Savers

Ringkasan perkembangan perbaikan perikanan oleh PT
168 Benoa periode July 2016 – December 2016

Muhammad Maskur Tamanyira – Seafood Savers Officer

Informasi Umum

- Lokasi** : Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap, Sendangbiru, Kabupaten Malang, Jawa Timur
Survey pertama : April 2015
Jumlah petambak/nelayan : Awalnya, total Armada Kapal yang aktif pada tahun 2015 dan terdata menjadi rantai produksi PT. 168 Bena adalah sebanyak **40 Armada** jenis sekoci yang keseluruhan armadanya telah didaftarkan ke DKP Provinsi Jawa Timur

2. Praktik Penangkapan

- Ukuran minimal panen/tangkap (nama komoditas) : Juvenil tuna sirip kuning, sekitar 10-15 Kg (berat tidak baku, karena ikan tidak ditimbang satuan jika ukurannya tidak mencapai 20 Kg)
- Metode penangkapan : Pancing Ulur, dengan armada tangkap 5-17 GT
- Kisaran harga beli : Rp. 35.000-50.000/ Kg

Di Sendangbiru, perikanan yang menjadi komoditas adalah Tuna, salah satunya jenis Tuna Sirip Kuning atau madidihang (Thunnus albacares). Ditangkap dengan metode pancing ulung (Handline) jenis ikan ini menjadi target utama pengimpor, yang berdatangan dari wilayah sekitar. Proses transaksi ikan hasil tangkapan dilakukan dengan cara lelang, yang diselenggarakan oleh Kantor Unit Pengelola Pelabuhan setempat.

3. Kapasitas produksi

Secara umum, produksi tuna di Sendangbiru di tahun 2012 total produksi ikan yang didaratkan di PPP Pondokdadap mencapai 5.273,27 tondengan nilai Rp 55.244.988.963. Produksi tuna, cakalang dan tongkol sebesar 3.378,55 ton atau mencapai 64,06% dari total produksi ikan yang didaratkan di PPP Pondokdadap. Adapun jenis tuna yang tertangkap antara lain madidihang (Thunnus albacares), tuna mata besar (Thunnus obesus) dan albakora (Thunnus alalunga) yang mencapai 1.012,10 ton (19,19%), sedangkan cakalang (Katsuwonus pelamis) sebesar 600,81 ton (11,39%) dan tongkol mencapai 1.765,64 ton (33,48%) (PPP Pondokdadap, 2012 dalam laporan Tahunan LOKA Tuna Bena 2013).

Berdasarkan informasi yang disampaikan, PT. 168 Bena memanfaatkan sebesar 11,474Kg madidihang dari Sendangbiru. Besaran ini diperoleh dari aktivitas pembelian pada periode Juli hingga Desember 2016. Jumlah tersebut didapatkan dari 5 trip armada penangkapan tuna (sekoci) di Sendangbiru, dengan jumlah kapal sebanyak 5 buah yang beroperasi. Jumlah yang menurun drastis ini diakibatkan karena pada periode Juli hingga Desember 2016, pembelian tuna dari Sendangbiru hanya terjadi di bulan Juli.

4. Keterangan tambahan

PT. 168 Bena dan PT. Hatindo Makmur bekerja sama dalam skema Seafood Savers dan mengupayakan perbaikan perikanan tuna secara bersama-sama di Sendangbiru.

Pada bulan September 2015, PT. 168 Benoa melaporkan perubahan jumlah armada yang berada dibawah rantai produksi mereka. Selain itu, disampaikan juga jumlah tangkapan yang dibeli oleh 168 Benia dari sendangbiru. Sebuah tindakan yang harus diapresiasi. Pelaporan berkala semacam ini, menjadi penting untuk pemantauan perbaikan FIP ke depannya.

Rekap data armada dan penangkapan:

NO	NAMA KAPAL	PELABUHAN PANGKALAN	INFORMASI ARMADA TANGKAP	Tanggal		Total Tuna Besar – YFT (kg)
				Berangkat	Kembali	
1	MANDIRI 275	SENDANG BIRU	GT. 12 NO. 1214/Mp	8-Jul-16	19-Jul-16	3,742
2	ALIF JAYA	SENDANG BIRU	GT. 6 C. 60 NO. 3493	11-Jul-16	19-Jul-16	2,129
3	TELUK BONE 03	SENDANG BIRU	GT. 6 C. 12 NO. 023	7-Jul-16	20-Jul-16	1,924
4	INDRIANI 03	SENDANG BIRU	GT. 7 C. 12 NO. 3179	12-Jul-16	20-Jul-16	2,317
5	BERKAT ILAHI 01	SENDANG BIRU	GT. 6 J.113 NO. 2575	11-Jul-16	21-Jul-16	2,315
6	BERKAH ALAM 06	SENDANG BIRU	GT. 6 C. 11 NO. 51	11-Jul-16	21-Jul-16	2,413
7	BERKAT ILAHI 02	SENDANG BIRU	GT. 5 C. 60 NO. 2482	11-Jul-16	21-Jul-16	2,131
8	BERKAT ILAHI 04	SENDANG BIRU	GT. 6 C. 60 NO. 3855	11-Jul-16	21/17/16	2,002
9	BERKAH ILAHI 05	SENDANG BIRU	GT. 7 C. 12 NO. 868	11-Jul-16	21-Jul-16	2,102
10	TELUK BONE 09	SENDANG BIRU	GT. 6 C. 12 NO. 854	11-Jul-16	21-Jul-16	1,973
11	TIGA PUTRA 01	SENDANG BIRU	GT. 6 C. 12 NO. 1668	11-Jul-16	21-Jul-16	2,142
12	TITIPAN ILAHI 01	SENDANG BIRU	GT. 5 C. 60 NO. 3364	11-Jul-16	21-Jul-16	2,127
13	CAHAYA MURNI 03	SENDANG BIRU	128 SB. J-117	11-Jul-16	21-Jul-16	3,515
14	RESKI 03	SENDANG BIRU	GT. 6 C. 60 NO. 3168	12-Jul-16	22-Jul-16	2,205
15	ADITIA 01	SENDANG BIRU	GT. 6 C. 60 NO. 4402	9-Jul-16	22-Jul-16	2,110
16	TELUK BONE 07	SENDANG BIRU	GT. 6 C. 60 NO. 4033	9-Jul-16	22-Jul-16	2,310
17	LIMA PUTRA	SENDANG BIRU	GT. 6 C. 60 NO. 3897	11-Jul-16	22-Jul-16	2,130
18	RAMA JAYA 01	SENDANG BIRU	GT. 6 C. 12 NO. 54	12-Jul-16	22-Jul-16	2,105
19	PENJURU BINTANG 04	SENDANG BIRU	GT. 5 C. 60 NO. 3083	12-Jul-16	22-Jul-16	2,504
20	PENJURU BINTANG 05	SENDANG BIRU	GT. 5 C. 60 NO. 3566	12-Jul-16	22-Jul-16	2,113
21	TIGA PUTRA 01	SENDANG BIRU	GT. 6 C. 12 NO. 1668	12-Jul-16	22-Jul-16	2,114
22	DUA PUTRA	SENDANG BIRU	GT. 5 C. 60 NO. 3903	12-Jul-16	22-Jul-16	2,215
23	SARINAH 01	SENDANG BIRU	GT. 11 NO. 1268/Mp	12-Jul-16	23-Jul-16	3,570
24	WAHYU RESKI 03	SENDANG BIRU	GT. 5 C. 60 NO. 3920	11-Jul-16	21-Jul-16	2,145

Rincian evaluasi keanggotaan (nama perusahaan) berdasarkan *Fisheries Improvement Program (FIP)* yang telah dilaksanakan:

AKTIVITAS/TUGAS	OUTPUT DAN INDIKATOR UNTUK AKTIVITAS/TUGAS	DETAIL AKTIVITAS (untuk anggota Seafood Savers)	PEMIMPIN AKTIVITAS & MITRA	Tahapan SEAFOOD SAVERS		HASIL EVALUASI	RENCANA TINDAK LANJUT/ KENDALA
				INTERMEDIATE	ADVANCE		
1. TATA KELOLA DAN DEFINISI DARI OBJEKTIF PENGELOLAAN PERIKANAN NASIONAL							
1.1. Memperjelas objektif untuk memastikan bahwa prioritas diberikan pada perikanan berkelanjutan dan pengelolaan perikanan berbasis lestari pada level lokal dan nasional	Mekanisme untuk memperluas hukum pada saat ini untuk memprioritaskan keberlanjutan dari perikanan, ketimbang objektif produksi dan perumbuhan, dan mengakomodasi prinsip PAFM dan	1.1.1 Memfasilitasi proses perkembangan dari EAFM dan/atau regulasi lain yang mendukung prinsip perikanan berkelanjutan	SDI, P4KSI			Belum dilaksanakan sepenuhnya	EAFM untuk perikanan tuna telah dikaji bersama antara Sekolah Tinggi Perikanan, Jakarta dan WWF-Indonesia dan di presentasikan dalam Simposium Tuna Nasional, 2014

	EAFM	1.1.2. Mengembangkan peraturan perusahaan untuk mendukung implementasi dari EAFM dan/atau regulasi lain yang mendukung prinsip perikanan berkelanjutan	Perusahaan			Belum dilaksanakan sepenuhnya	EAFM untuk perikanan tuna telah dikaji bersama antara Sekolah Tinggi Perikanan, Jakarta dan WWF-Indonesia dan di presentasikan dalam Simposium Tuna Nasional, 2014
1.2. Perpanjangan dari system pengelolaan pada tingkat lokal	Seluruh prinsip pengelolaan perikanan, termasuk pendekatan pencegahan, harus diperluas ke tingkat kabupaten dan provinsi	1.2.1 Memfasilitasi regulasi provinsi/kabupaten sebagai intepertasi dari peraturan kementerian terkait rencana pengelolaan yang mencakup Harvest Control Rule	SDI, P4KSI, DKP Provinsi & Kabupaten, PLN, PSDP			Unit Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap, Sendangbiru telah melaksanakan kegiatan pengisian logbook untuk nelayan tuna	<p>pengisian informasi dalam logbook belum terstandarisasi dengan baik. Banyak informasi pengisian jenis ikan yang masih diisikan dengan nama lokal ikan menggunakan bahasa setempat</p> <p>rekomendasi:</p> <p>Membangun standar pengisian, melibatkan pihak dinas provinsi setempat dan kementerian kelautan dan perikanan</p>

	<p>1.2.2. Perusahaan mengimplementasikan langkah langkah yang diatur pada rencana pengelolaan perikanan Provinsi/kabupaten sebagai patron dari perkembangan dan implementasi di area tersebut. Rencana tersebut harus memiliki harvest control rule yang mencakup prinsip perikanan berkelanjutan contoh: ukuran tangkap minimum, menyesuaikan jumlah usaha dengan kapasitas stok</p>	<p>Perusahaan</p>		<p>Unit Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap, Sendangbiru telah melaksanakan kegiatan pengisian logbook untuk nelayan tuna</p>	<p>pengisian informasi dalam logbook belum terstandarisasi dengan baik. Banyak informasi pengisian jenis ikan yang masih diisikan dengan nama lokal ikan menggunakan bahasa setempat</p> <p>rekomendasi:</p> <p>Membangun standar pengisian, melibatkan pihak dinas provinsi setempat dan kementerian kelautan dan perikanan</p>
	<p>1.2.3. Memfasilitasi regulasi provinsi/kabupaten sebagai perpanjangan dari regulasi EAFM</p>	<p>SDI, DKP Provinsi & Kabupaten</p>		<p>Belum dilaksanakan sepenuhnya</p>	<p>EAFM untuk perikanan tuna telah dikaji bersama antara Sekolah Tinggi Perikanan, Jakarta dan WWF-Indonesia dan di presentasikan dalam Simposium Tuna Nasional, 2014</p>

	<p>dan/atau regulasi nasional lainnya yang mendukung prinsip perikanan ikan karang yang berkelanjutan</p>				
	<p>1.2.4 Perusahaan mengimplementasikan langkah langkah yang diatur di guideline EAFM Indonesia dan/atau regulasi nasional lainnya yang mendukung prinsip perikanan ikan karang yang berkelanjutan sebagai patron dari pengembangan dan implementasi dari EAFM di tingkat Provinsi/Kabupaten</p>	<p>Perusahaan</p>		<p>Belum dilaksanakan sepenuhnya</p>	<p>EAFM untuk perikanan tuna telah dikaji bersama antara Sekolah Tinggi Perikanan, Jakarta dan WWF-Indonesia dan di presentasikan dalam Simposium Tuna Nasional, 2014</p>

1.3. Indonesia menjadi anggota penuh dari WCPFC dan bersifat instrumental dalam memformulasikan kebijakan pencegahan pada RFMOs dan implementasi keputusan	Untuk meneruskan proses untuk menjadi anggota penuh WCPFC	1.3.1. Perusahaan secara proaktif mendukung Indonesia untuk menjadi anggota WCPFC (e.g. mengirimkan surat kepada MMAF, menghadiri pertemuan WCPFC apabila diperlukan	Perusahaan				Sejauh ini PT. 168 Bena aktif dalam aktivitas yang dilaksanakan WWF terutama jika ada kunjungan dan keterbukaan dalam membagi informasi kepada stakeholder
		1.3.2. Memonitor dan menyediakan dukungan untuk memastikan kelanjutan proses dari kenggotaan Indonesia dalam WCPFC	KKP (SDI, P4KSI, PUSKITA), KTI, KEMLU, SetKab			-	Indonesia telah menjadi anggota penuh dari WCPFC. Selain itu PT. 168 Bena mencari ikan di Samudera Hindia yang menjadi kewenangan dari Indian Ocean Tuna Commision
	Secara aktif berpartisipasi dalam proses pengadopsian kebijakan pencegahan pada pengelolaan perikanan dalam RFMO	1.3.3. Memastikan prinsip pencegahan diadopsi dalam regulasi nasional (e.g. peraturan kementrian, rencana pengelolaan perikanan	SDI, P4KSI				Belum dilaksanakan sepenuhnya

		1.3.4. Mempromosikan pengadopsian prinsip pencegahan dalam RFMO mengikuti konvensi -konvensi internasional	SDI, P4KSI, PLN				Permen 12/2012 dan 30/2012 mengenai kewajiban mendaratkan ikan hiu secara utuh jika tidak sengaja tertangkap di perairan ZEEI dan Laut lepas
	Secara teratur menghadiri pertemuan	1.3.5. Indonesia mempersiapkan laporan dan menghadiri pertemuan WCPFC and RFMOs lain yang relevan	SDI, P4KSI				Indonesia mengirimkan wakil dalam setiap pertemuan RFMO (Indian Ocean dan Pacific Ocean) ;
1.4. Pengembangan rencana pengelolaan perikanan spesifik	Definisi dari target dan objektif, kepatuhan pada konvensi RFMO, implementasi alat nasional dan HCRs (lihat juga 3.4), implementasi langkah pengelolaan pencegahan, mengembangkan strategi mitigasi bycatch (3.5), mengaplikasikan MCS, dan meninjau ulang strategi	1.4.1 Pengembangan dokumen pengelolaan Tuna sesuai dengan rekomendasi FIP	SDI, P4KSI, PUP, PSDP, KTI dan stakeholder lainnya (ASTUIN, ATLI, DKP Provinsi dan Kabupaten, dll) dan WWF/SFP				rencana aksi nasional untuk Tuna Cakalang Tongkol.tersedia (Permen 107/ 2015) yang diterbitkan pada agustus 2015
		1.4.2 Adopsi dari prinsip pengelolaan tuna ke dalam rencana pengelolaan perikanan	SDI, DKP Provinsi dan Kabupaten				rencana aksi nasional untuk Tuna Cakalang Tongkol.tersedia (Permen 107/ 2015) yang diterbitkan pada agustus 2015

		berbasis area yang sudah ada					
		1.4.3 Perusahaan secara proaktif mendukung dan mengimplementasikan rencana pengelolaan perikanan (e.g. menyediakan surat mengenai rencana pengelolaan, secara proaktif menghadiri pertemuan apabila dibutuhkan)	Perusahaan			Belum sepenuhnya dilaksanakan	Sejauh ini PT. 168 Benoa aktif dalam aktivitas yang dilaksanakan WWF terutama jika ada kunjungan dan keterbukaan dalam membagi informasi kepada stakeholder
2. PENGUATAN KERANGKA KERJA INSTITUSIONAL							
2.1. Proses pengambilan keputusan dan konsultasi di konsolidasi melalui FKPPS dan Komite Pengelolaan Tuna, yang mengimplementasikan strategi pengelolaan pada perairan territorial, archipelagic dan EEZ	Melegalisasi FKPPS dan Komite Pengelolaan sebagai institusi apex formal untuk peran pengelolaan perikanan Indonesia sebagaimana didefinisikan	2.1.1 Memfasilitasi ketersediaan regulasi (e.g. peraturan kementerian) yang mendukung FKPPS dan otoritas pengelolaan nasional (e.g. KTI, satuan tugas) untuk bertanggung jawab atas pengelolaan perikanan	SDI, DKP Provinsi dan Kabupaten, stakeholder,			Belum dilaksanakan sepenuhnya	FKPPS sudah ada namun masih bersifat ad-hoc (volunterary). Dan belum ada keputusan yang mengikat dari setiap hasil pertemuan FKPPS

	2.1.2 Memonitor dan mengevaluasi kinerja FKPPS dan/atau otoritas pengelolaan nasional (e.g. KTI, task force) yang dilaksanakan oleh instansi KKP baik internal maupun eksternal untuk bertanggung jawab atas pengelolaan perikanan tuna	SDI, DKP Provinsi dan Kabupaten, stakeholder,			Belum dilaksanakan sepenuhnya	FKPPS sudah ada namun masih bersifat ad-hoc (volunterary). Dan belum ada keputusan yang mengikat dari setiap hasil pertemuan FKPPS
Keputusan diimplementasikan secara sentral. Provinsi dan Kabupaten mengimplementasikan kebijakan, namun tidak bertanggung jawab atas memformulasikan dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan syarat pengelolaan nasional	2.1.3 Memfasilitasi pembentukan otoritas untuk mengimplementasikan langkah - langkah pada rencana pengelolaan perikanan berbasis area (RPP WPP) di tingkat Provinsi/Kabupaten	SDI, DKP Provinsi dan Kabupaten, stakeholder,,			Belum dilaksanakan sepenuhnya	FKPPS sudah ada namun masih bersifat ad-hoc (volunterary). Dan belum ada keputusan yang mengikat dari setiap hasil pertemuan FKPPS
	2.1.4 Memonitor dan mengevaluasi kinerja FKPPS dan/atau otoritas pengelolaan nasional (e.g. KTI, task force) yang	SDI, DKP Provinsi dan Kabupaten, stakeholder,			Belum dilaksanakan sepenuhnya	FKPPS sudah ada namun masih bersifat ad-hoc (volunterary). Dan belum ada keputusan yang mengikat dari setiap hasil pertemuan FKPPS

		dilaksanakan oleh instansi KKP baik internal maupun eksternal untuk bertanggung jawab atas pengelolaan perikanan tuna				
Memungkinkan keterlibatan aktif dari stakeholders dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan	2.1.5 Secara aktif melibatkan industry, instansi penelitian, LSM dalam pertemuan terkait pengambilan keputusan perikanan	SDI, P4KSI, PUP, PSDP, KTI dan stakeholder lainnya (ASTUIN, ATLI, DKP Provinsi dan Kabupaten, dll)			Belum sepenuhnya dilaksanakan	Sejauh ini PT. 168 Benoa aktif dalam aktivitas yang dilaksanakan WWF terutama jika ada kunjungan dan keterbukaan dalam membagi informasi kepada stakeholder
	2.1.6 Perusahaan secara proaktif mendukung dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada tingkat provinsi/kabupaten dan nasional (e.g menghadiri pertemuan)	Perusahaan			Belum sepenuhnya dilaksanakan	Sejauh ini PT. 168 Benoa aktif dalam aktivitas yang dilaksanakan WWF terutama jika ada kunjungan dan keterbukaan dalam membagi informasi kepada stakeholder

<p>2.2. Identifikasi tanggung jawab dan peningkatan kapasitas pada badan-badan pelaksana</p>	<p>Allokasi tugas pada pemangku kepentingan spesifik, Satker Perikanan Tuna, KKP, DKP Provinsi dan Kabupaten serta kelompok komunitas</p>	<p>2.2.1 Memfasilitasi ketersediaan regulasi (peraturan kementerian, peraturan direktorat jenderal dll) mengenai alokasi tugas dengan deskripsi pekerjaan spesifik pada instansi yang tebat dan rrelevan untuk mendukung pengelolaan perikanan</p>	<p>SDI, DKP Provinsi dan Kabupaten, stakeholder, sebagaimana dijelaskan di atas</p>			<p>Unit Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap, Sendangbiru telah melaksanakan kegiatan pengisian logbook untuk nelayan tuna</p>	<p>pengisian informasi dalam logbook belum terstandarisasi dengan baik. Banyak informasi pengisian jenis ikan yang masih diisikan dengan nama lokal ikan menggunakan bahasa setempat</p> <p>rekomendasi: Membangun standar pengisian, melibatkan pihak dinas provinsi setempat dan tau kementerian kelautan dan perikanan</p>
<p>3. AKTIVITAS PENELITIAN</p>							
<p>3.1. Penguatan kapasitas National scientific stock assessment untuk mendukung pengelolaan yang memperhitungkan factor biologis</p>	<p>Peningkatan kapasitas SDN untuk stock assessment dan pembangunan unit penelitian spesifik untuk region di Benoa dan Bitung</p>	<p>3.1.1 Lokakarya mengidentifikasi dan memastikan bahwa otoritas yang bertanggung jawab untuk melakukan analisis stock assessment telah diperkuat dan metodologi untuk assessment disetujui secara bersama (yang juga mencakup kebutuhan untuk MSC)</p>	<p>P4KSI, BPPL, KOMNAS KAJISKAN, BPSDM.</p>			<p>Belum dilaksanakan sepenuhnya</p>	<p>rencana aksi nasional untuk Tuna Cakalang Tongkol tersedia (Permen 107/ 2015) yang diterbitkan pada agustus 2015</p>

		3.1.2 Pelatihan mengenai stock assessment, biologis perikanan dan kapasitas penangkapan ikan	P4KSI, BPPL, KOMNAS KAJISKAN, BPSDM.		Belum dilaksanakan sepenuhnya	Indonesia melalui P4KSI (Balitbang KP, BRPL, dan LOKA Tuna Bena) mengikuti kegiatan dan melakukan pencatatan serta melaporkan untuk RFMO
3.2. Indonesia memperkuat komitmennya terhadap pengumpulan dan kolasi data, terutama dalam bentuk struktur stok, kelimpahan stok, dan komposisi armada	Kelimpahan stok, komposisi armada, produktivitas stok dan struktur stok	3.2.1 Pengembangan modul metodologi sampling dan pelaksanaan pelatihan mengenai kelimpahan stok tuna, komposisi armada, produktivitas stok dan struktur stok	P4KSI, BPPL, SDI		Belum dilaksanakan sepenuhnya	Indonesia melalui P4KSI (Balitbang KP, BRPL, dan LOKA Tuna Bena) mengikuti kegiatan dan melakukan pencatatan serta melaporkan untuk RFMO
		3.2.2 Meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pengumpulan data tuna dengan memfasilitasi aktifitas penelitian dan menyediakan akses ke fasilitas produksi mereka	P4KSI, BPPL, SDI, industri (langsung dan via asosiasi industri)		Belum dilaksanakan sepenuhnya	Indonesia melalui P4KSI (Balitbang KP, BRPL, dan LOKA Tuna Bena) mengikuti kegiatan dan melakukan pencatatan serta melaporkan untuk RFMO
		3.2.3 Penelitian mengenai kelimpahan stok tuna, komposisi	P4KSI, BPPL, KOMNAS KAJISKAN		Belum dilaksanakan sepenuhnya	Indonesia melalui P4KSI (Balitbang KP, BRPL, dan

		armada, produktivitas stok dan struktur stok menggunakan metodologi yang disetujui				LOKA Tuna Bena) nmengikuti kegiatan dan melakukan pencatatan serta melaporkan untuk RFMO
		3.2.4 Meningkatkan aktifitas penelitian dari institute penelitian tuna hindia di Bena, dan mendorong pembangunan institute serupa di Bitung	P4KSI, BPPL, KOMNAS KAJISKAN		Belum dilaksanakan sepenuhnya	Indonesia melalui P4KSI (Balitbang KP, BRPL, dan LOKA Tuna Bena) nmengikuti kegiatan dan melakukan pencatatan serta melaporkan untuk RFMO
3.3. Indonesia perlu mengadopsi LRP nya sendiri berdasarkan nasihat RFMO dan nasional agar stok yang dijaga di atas tingkat biomass menyediakan poin keuntungan berkelanjutan maksimal	Penguatan stok asesment (YFT, SKJ, BET dan lain-lain)	3.3.1 Melaksanakan stock assessment untuk tuna (YFT, SKJ, BET dll)	P4KSI, BPPL, KOMNAS KAJISKAN		Belum dilaksanakan sepenuhnya	rencana aksi nasional untuk Tuna Cakalang Tongkol.tersedia (Permen 107/ 2015) yang diterbitkna pada agustus 2015 Indonesia akan membangun HCR perairan nasional. Seusai panduan dari CSIRO (WCPFC)
		3.3.2 Perusahaan berpartisipasi dalam pengumpulan data tuna dengan memfasilitasi aktifitas penelitian dan menyediakan akses ke fasilitas produks mereka (e.g. Logbook, onboard observer,	P4KSI, BPPL, SDI, industry (langsung dan via asosiasi industri)		Belum dilaksanakan sepenuhnya	rencana aksi nasional untuk Tuna Cakalang Tongkol.tersedia (Permen 107/ 2015) yang diterbitkna pada agustus 2015 Indonesia akan membangun HCR perairan nasional. Seusai panduan dari CSIRO (WCPFC)

	gonad sampling, data tangkapan tahunan, dll)				
Mengatur tingkat Level Reference Points nasional untuk masing - masing spesies	3.3.3 Mengembangkan draft level Reference Points nasional untuk masing -masing spesies tuna	P4KSI, BPPL, KOMNAS KAJISKAN, SDI		Belum dilaksanakan sepenuhnya	rencana aksi nasional untuk Tuna Cakalang Tongkol.tersedia (Permen 107/ 2015) yang diterbitkan pada agustus 2015 Indonesia akan membangun HCR perairan nasional. Sesuai panduan dari CSIRO (WCPFC)
	3.3.4 Membangun regulasi pada level <i>Reference Points</i> nasional untuk masing-masing spesies tuna	P4KSI, SDI		Belum dilaksanakan sepenuhnya	rencana aksi nasional untuk Tuna Cakalang Tongkol.tersedia (Permen 107/ 2015) yang diterbitkan pada agustus 2015 Indonesia akan membangun HCR perairan nasional. Sesuai panduan dari CSIRO (WCPFC)
	3.3.5 Mengembangkan kebijakan mengenai regional LRP yang diatur berdasarkan kapasitas daya dukung biologis	SDI, WWF		Belum dilaksanakan sepenuhnya	rencana aksi nasional untuk Tuna Cakalang Tongkol.tersedia (Permen 107/ 2015) yang diterbitkan pada agustus 2015
Merekomendasikan ke WCPFC dan IOTC untuk memiliki LRP regional					

		3.3.6 Secara proaktif mengadvokasikan WCPFC dan IOTC untuk memiliki LRP regional	SDI, P4KSI, KTI, WWF		Belum dilaksanakan sepenuhnya	rencana aksi nasional untuk Tuna Cakalang Tongkol.terseedia (Permen 107/ 2015) yang diterbitkan pada agustus 2015 Indonesia akan membangun HCR perairan nasional.
3.4. Strategi panen formal diadopsi untuk tuna Samudera Hindia dan Pasifik Indonesia yang dihubungkan dengan (Nasional atau RFMO) Limit Reference Points, yang mencakup semua rentang perikanan (termasuk < 30 GT dan 5 GT). Objek haruslah konsisten dengan nasihat RFMO, untuk kasus Pasifik, adalah untuk membatasi usaha penangkapan pada level 2004, dan untuk mengurangi usaha pada YFT dan BET sebesar	KKP mengembangkan Harvest Strategy yang dihubungkan dengan CMM 2008 -01 untuk aktivitas EEZ/YFT dan BET dan membatasi usaha pada level 2001 -2004, sebagai tambahan untuk langkah - langkah yang diambil (i.e kontrol usaha/ pengurangan kapasitas di perairan territorial/archipelagic apabila interaksi dengan juvenil YFT/BET bersifat signifikan	3.4.1 Mendukung P4KSI dalam pengembangan karya ilmiah yang memperhitungkan sumber daya tuna dan perikanan sebagai basis dalam mengembangkan dokumen kebijakan	SDI, FKPP, KTI		Belum dilaksanakan sepenuhnya	rencana aksi nasional untuk Tuna Cakalang Tongkol.terseedia (Permen 107/ 2015) yang diterbitkan pada agustus 2015 Indonesia akan membangun HCR perairan nasional. Sesuai panduan dari CSIRO (WCPFC)
		3.4.2 Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP mengembangkan Harvest Strategy yang dihubungkan ke CMM 2008 -01 untuk aktivitas EEZ/YFT dan BET dan pengetatan pada usaha yang ditentukan sesuai dengan level 2001 - 2004, sebagai	SDI, FKPP, KTI		Belum dilaksanakan sepenuhnya	rencana aksi nasional untuk Tuna Cakalang Tongkol.terseedia (Permen 107/ 2015) yang diterbitkan pada agustus 2015 Indonesia akan membangun HCR perairan nasional. Sesuai panduan dari CSIRO (WCPFC)

30%		<p>tambahan untuk langkah-langkah yang diambil (i.e kontrol usaha/ pengurangan kapasitas di perairan territorial/archipelagic apabila interaksi dengan juvenil YFT/BET bersifat signifikan</p>				
<p>3.5. Rencana pengelolaan perikanan spesifik ditetapkan mencakup peraturan kontrol yang didefinisikan secara baik dalam membatasi usaha (dengan perijinan entri yang ketat, terutama pada tingkat provinsi) dan efek dari BET juvenil (pengetatan pada penggunaan FADs (pada seluruh tingkatan pemerintahan), meningkatkan ukuran minimal</p>	<p>Mengembangkan rencana pengelolaan perikanan spesifik (rencana pengelolaan perikanan nasional untuk Tuna)</p>	<p>3.5.1 Memfasilitasi proses pengembangan regulasi pengelolaan Tuna di Indonesia yang mengatur HCR, sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, pengetatan perijinan entri pada tingkat provinsi, mengurangi efek dari BET juvenil (melalui, contoh: pengetatan pada penggunaan FADs (pada seluruh tingkatan pemerintahan),</p>	<p>SDI, P4KSI, DKP Provinsi & Kabupaten, PLN, KKJI, PSDP</p>		<p>Belum dilaksanakan sepenuhnya</p>	<p>rencana aksi nasional untuk Tuna Cakalang Tongkol tersedia (Permen 107/ 2015) yang diterbitkan pada agustus 2015</p> <p>Indonesia akan membangun HCR perairan nasional. Sesuai panduan dari CSIRO (WCPFC)</p>

<p>jaring, area tertutup, dan lainlain). Alat yang digunakan harus memprhitungkan ketidakpastian</p>		<p>meningkatkan ukuran minimal jaring, area tertutup, dan lain - lain). Alat yang digunakan harus memprhitungkan ketidakpastian</p>				
		<p>3.5.2 Partisipasi perusahaan untuk mendukung rencana pengelolaan tuna yang menyebutkan Harvest Control Rule e.g. batas ukuran minimal, menyesuaikan jumlah usaha dengan daya dukung dan regulasi, mengikuti semua perijinan perikanan, FADs; menggunakan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan; menangkap ikan di lokasi yang tepat, dll</p>	<p>Perusahaan</p>		<p>Belum dilaksanakan sepenuhnya</p>	<p>Belum ada peraturan dari PT. 168 Bena dan rantai perdagangannya untuk keterlibatannya dalam aktivitas perbaikan langkah ini di tingkat nasional dan lokal</p>

3.6. Pengumpulan data bycatch	Tinjauan ulang dari informasi yang tersedia mengenai status stok, termasuk perikanan umpan, hiu, marlin, dan species pelagis utama lainnya	3.6.1 Tinjauan ulang dari informasi yang tersedia mengenai status stok, termasuk perikanan umpan, hiu, marlin, dan species pelagis utama lainnya	P4KSI, KOMNAS KAJISKAN			Belum dilaksanakan sepenuhnya	Pencatatan data bycatch di perikanan tuna handline skala kecil Belum dilaksanakan sepenuhnya
		3.6.2 Perusahaan menyediakan informasi mengenai status stok, termasuk perikanan umpan, hiu, marlin, dan species pelagis utama lainnya (cth: via log book dan/atau formulir penelitian)	Perusahaan			Belum dilaksanakan sepenuhnya	Pencatatan data bycatch di perikanan tuna handline skala kecil Belum dilaksanakan sepenuhnya di tingkat nasional dan perusahaan
	Pengembangan modul pelatihan observasi (dari contoh WWF/SPC) dan pelatihan observer	3.6.3 Memperbaiki modul pelatihan observer/enumerator yang sudah ada, terutama mengenai laporan data bycatch (Data yang sudah ada perlu lebih rinci)	P4KSI, BPPL, SDI, industri, WWF/NGO, Universitas, SPC			Belum dilaksanakan sepenuhnya	Pencatatan data bycatch di perikanan tuna handline skala kecil Belum dilaksanakan sepenuhnya di tingkat nasional dan perusahaan

	3.6.4. Perusahaan mengimplementasikan program observer untuk armadanya	Perusahaan			Belum dilaksanakan sepenuhnya	Pencatatan data bycatch di perikanan tuna handline skala kecil Belum dilaksanakan sepenuhnya di tingkat nasional dan perusahaan
Mewajibkan monitoring kepadatan kumpulan ikan dan ukuran dari rumpon secara periodic untuk menentukan dampak pada spesies ikan lain yang tercakup dalam aktivitas	3.6.5. Melakukan studi dan monitoring pada status dan dampak dari kepadatan kumpulan ikan, ukuran, dan spesies ikan lain yang tercakup dalam aktivitas pada rumpon	P4KSI, BPPL, SDI, industry, WWF/NGO, universities, SPC			Belum dilaksanakan sepenuhnya	RPP Tuna belum tersedia, dan kebutuhan mengenai Limit Reference belum dibahas secara nasional. Selain itu, peraturan rumpon telah tersedia, yaitu permen 30/ tahun 2004. Namun pelaksanaan di lapangannya belum diketahui secara jelas ketaatannya

		3.6.6. Perusahaan menyediakan informasi dan melakukan monitoring pada dampak dari rumpon terhadap kepadatan kumpulan ikan, ukuran, dan spesies ikan lain yang tercakup dalam aktivitas.	Perusahaan		Belum dilaksanakan sepenuhnya	RPP Tuna belum tersedia, dan kebutuhan mengenai Limit Reference belum dibahas secara nasional. Selain itu, peraturan rumpon telah tersedia, yaitu permen 30/ tahun 2004. Namun pelaksanaan di lapangannya belum diketahui secara jelas ketaatannya
Modeling dari penghapusan perikanan untuk menilai dampak pada ekosistem menggunakan SPC tools – ECOPATH dll		3.6.7. Mendorong RFMO untuk melakukan modeling dari penghapusan perikanan untuk menilai dampak pada ekosistem menggunakan SPC tools – ECOPATH dll	P4KSI, SPC, CSIRO		Belum dilaksanakan sepenuhnya	Belum ada model ecosystem yang dapat digunakan sebagai dasar

<p>3.7. Penyelesaian kerangka berbasis resiko untuk retained species dan bycatch (Cakalang, Tuna species kecil, mahimahi, kawakawa dan hiu) dan ikan umpan. Membutuhkan peneliti independen untuk mengumpulkan informasi kualitatif dan kuantitatif untuk melakukan pendekatan berbasis resiko yang mencakup SICA dan PSA</p>	<p>Pemangku kepentingan menerima pelatihan penilaian resiko dan berpartisipasi dalam workshop mengenai metode spesifik untuk menentukan resiko terhadap spesies non target</p>	<p>3.7.1 Melakukan pelatihan penilaian resiko dan berpartisipasi dalam workshop mengenai metode spesifik untuk menentukan resiko terhadap spesies non target pada pemangku kepentingan</p>	<p>P4KSI, BPPL, SDI, PSDP, industry, WWF/NGO, University, multistakeholder involvement, RFMOs, external research bodies</p>			<p>WWF-ID bekerjasama dengan FPIK-IPB untuk melakukan RBF dengan menggunakan PSA dari MSC</p>	<p>Hasil penilaian RBF dinilai kurang baik dan harus diperbaiki. RBF dapat dilakukan per unit sertifikasi</p>
	<p>Diambil dari informasi 4.1 dan melakukan risk assessment/ penilaian resiko</p>	<p>3.7.2 Melakukan penilaian berbasis resiko untuk menentukan resiko terhadap spesies non target</p>	<p>P4KSI, BPPL</p>			<p>WWF-ID bekerjasama dengan FPIK-IPB untuk melakukan RBF dengan menggunakan PSA dari MSC</p>	<p>Hasil penilaian RBF dinilai kurang baik dan harus diperbaiki. RBF dapat dilakukan per unit sertifikasi</p>
		<p>3.7.3 Perusahaan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk Risk Based Assessment untuk menentukan resiko terhadap spesies non target</p>	<p>Perusahaan</p>			<p>WWF-ID bekerjasama dengan FPIK-IPB untuk melakukan RBF dengan menggunakan PSA dari MSC</p>	<p>Hasil penilaian RBF dinilai kurang baik dan harus diperbaiki. RBF dapat dilakukan per unit sertifikasi</p>
		<p>3.7.4 Mengembangkan strategi menggunakan data dari RBA untuk evaluasi MSC</p>	<p>P4KSI, BPPL, WWF</p>			<p>WWF-ID bekerjasama dengan FPIK-IPB untuk melakukan RBF dengan menggunakan PSA dari MSC</p>	<p>Hasil penilaian RBF dinilai kurang baik dan harus diperbaiki. RBF dapat dilakukan per unit sertifikasi</p>

3.8. Batas nasional untuk interaksi ETP ditentukan dan data independen dikumpulkan pada batas ETP untuk memastikan bahwa bycatch tercakup dalam persyaratan internasional dan nasional. Aktivitas mungkin butuh melibatkan obeserver untuk ditempatkan di seluruh rentang perikanan	NPOA difinalisasi untuk memperhitungkan WCPFC CMMs (hiu, penyu, setasea dan burung)	3.8.1 Mengembangkan NPOA dari spesies ETP di Indonesia (hiu, penyu, setasea dan burung)	SDI, FKPPS, KTI		Belum dilaksanakan sepenuhnya	Beluma adanya aturan mengenai pemanfaatan bycatch di nasional (kecuali Penyu)
		3.8.2 Perusahaan menyediakan informasi dan mengimplementasikan NPOA dari spesies ETP di Indonesia (hiu, penyu, setasea dan burung)	Perusahaan		Belum dilaksanakan sepenuhnya	rencana aksi nasional untuk Tuna Cakalang Tongkol.tersedia (Permen 107/ 2015) yang diterbitkna pada agustus 2015 di dalamnya diatur Indonesia akan membangun mitigasi bycatch
3.9. Strategi pengelolaan dan mitigasi	Mengembangkan strategi penglolan untuk species bycatch dan baitfish untuk digabungkan ke dalam rencana pengelolaan (1.4)	3.9.1 P4KSI akan menyediakan karya ilmiah terkait sumberdaya tuna dan perikanan sebagai dasar dalam mengembangkan dokumen kebijakan	SDI, FKPPS, KTI, KAPI, P4KSI		Belum dilaksanakan sepenuhnya	rencana aksi nasional untuk Tuna Cakalang Tongkol.tersedia (Permen 107/ 2015) yang diterbitkna pada agustus 2015 di dalamnya diatur Indonesia akan membangun mitigasi bycatch

	<p>3.9.2 Perusahaan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan karya ilmiah mengenai strategi pengelolaan dan dokumen mitigasi untuk perikanan bycatch dan ikan umpan</p>	<p>Company</p>		<p>Belum dilaksanakan sepenuhnya</p>	<p>rencana aksi nasional untuk Tuna Cakalang Tongkol.tersedia (Permen 107/ 2015) yang diterbitkan pada agustus 2015. Di dalamnya diatur Indonesia akan membangun mitigasi bycatch</p> <p>Beluma adanya aturan strategi pemanfaatan ikan umpan di nasional</p>
	<p>3.9.3 Direktorat pengelolaan sumber daya perikanan tangkap DG akan mengembangkan strategi pengelolaan dan dokumen mitigasi untuk perikanan bycatch dan ikan umpan</p>	<p>SDI, KAPI, P4KSI</p>		<p>Belum dilaksanakan sepenuhnya</p>	<p>rencana aksi nasional untuk Tuna Cakalang Tongkol.tersedia (Permen 107/ 2015) yang diterbitkan pada agustus 2015. Di dalamnya diatur Indonesia akan membangun mitigasi bycatch</p> <p>Beluma adanya aturan strategi pemanfaatan ikan umpan di nasional</p>

		3.9.4 Perusahaan memiliki kebijakan untuk mendukung strategi pengelolaan dan dokumen mitigasi untuk perikanan bycatch dan ikan umpan	Perusahaan			Belum dilaksanakan sepenuhnya	Beluma adanya aturan strategi dana atau mitigasi pemanfaatan bycatch dan ikan umpan di nasional
3.10. Rencana Penelitian Indonesia dipersiapkan untuk memperhitungkan permintaan nasional dan internasional dan kewajiban dengan biaya yang semestinya dialokasikan dari industri, pemerintah dan donor	Mengumpulkan informasi untuk menentukan celah pada data, fokus taktis pada stok target yang kritis (dan tidak terbatas pada proses review FMA yang sedang berlangsung), <i>Cost effective risk assessment</i> ditanamkan kedalam <i>analytical tools</i> , aplikasi dari model ekosistem, pembangunan kapasitas untuk mendukung hal - hal di atas, peningkatan kesadaran dari	3.10.1 Workshop mengenai informasi untuk menentukan celah pada data, fokus taktis pada stok target yang kritis (dan tidak terbatas pada proses review FMA yang sedang berlangsung), <i>Cost effective risk assessment</i> ditanamkan kedalam <i>analytical tools</i> , aplikasi dari model ekosistem, pembangunan kapasitas untuk mendukung hal - hal di atas, peningkatan	P4KSI, (BPPL, BBRSE, KAPI)			Belum dilaksanakan sepenuhnya	Sejauh ini PT. 168 Bena aktif dalam aktivitas yang dilaksanakan WWF terutama jika ada kunjungan dan keterbukaan dalam membagi informasi kepada stakeholder

	aktivitas yang akan dilaksanakan dan review periodik (termasuk sebagai bahan untuk dinilai oleh pihak eksternal)	kesadaran dari aktivitas yang akan dilaksanakan dan review periodik (termasuk sebagai bahan untuk dinilai oleh pihak eksternal)					
		3.10.2 Perusahaan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk workshop tersebut	Perusahaan			Belum sepenuhnya dilaksanakan	Sejauh ini PT. 168 Bena aktif dalam aktivitas yang dilaksanakan WWF terutama jika ada kunjungan dan keterbukaan dalam membagi informasi kepada stakeholder
	Mencari kerjasama dengan SPC/CSIRO terkait pengumpulan data ekosistem	3.10.3 P4KSI membentuk kerjasama dengan SPC/CSIRO terkait pengumpulan data ekosistem	P4KSI			Belum dilaksanakan sepenuhnya	Indonesia melalui P4KSI (Balitbang KP, BRPL, dan LOKA Tuna Bena) mengikuti kegiatan dan melakukan pencatatan serta melaporkan untuk RFMO
	Memasukan peningkatan kesadaran dari rencana penelitian untuk memperbaiki tingkat pemahaman dari pemangku kepentingan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten	3.10.4 Melibatkan pemangku kepentingan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten pada sosialisasi dan implementasi	SDI, P4KSI, DKP Provinsi & Kabupaten, PLN, KKJI, PSDP			Belum dilaksanakan sepenuhnya	Kegiatan terkait aktivitas ini Belum dilaksanakan sepenuhnya
		3.10.5 Membagi hasil dari penelitian ke tingkat nasional dan kabupaten	SDI, P4KSI, DKP Provinsi & Kabupaten, PLN, KKJI, PSDP			Belum dilaksanakan sepenuhnya	Kegiatan terkait aktivitas ini Belum dilaksanakan sepenuhnya

		3.10.6 Perusahaan terlibat dalam penelitian	Perusahaan			Belum dilaksanakan sepenuhnya	Kegiatan terkait aktivitas ini Belum dilaksanakan sepenuhnya
	Mengeksten proses tinjauan lang internal (cth: penelitian, pengelolaan) menggabungkan input dari tingkat provinsi dan kabupaten	3.10.7 Mengeksten proses tinjauan lang internal (cth: penelitian, pengelolaan) menggabungkan input dari tingkat provinsi dan kabupaten	SDI, P4KSI, DKP Provinsi & Kabupaten			Belum dilaksanakan sepenuhnya	Kegiatan terkait aktivitas ini Belum dilaksanakan sepenuhnya
	Untuk merencanakan proses tinjauan ulang eksternal, serta monitoring dan implementasi dari rencana tersebut	3.10.8 Untuk merencanakan proses tinjauan ulang eksternal, serta monitoring dan implementasi dari rencana tersebut	BPK, KTI			Belum dilaksanakan sepenuhnya	Kegiatan terkait aktivitas ini Belum dilaksanakan sepenuhnya
1. PENGUATAN KEPATUHAN							
4.1. Implementasi aksi kepatuhan berdasarkan risk analysis dan menentukan bentuk penegakan prioritas pada seluruh rentang perikanan tuna	Rencana kepatuhan dikembangkan bersama dengan otoritas nasional, provinsi, dan kabupaten serta organisasi komunitas	4.1.1 Menginiasi pengembangan dari peraturan kepatuhan (termasuk aktivitas, mitra, dan biaya) mengikutsertakan otoritas nasional, provinsi, dan kabupaten serta organisasi	PSDP, DKP Provinsi & Kabupaten / POKMAS			Belum dilaksanakan sepenuhnya	Belum teridentifikasi kelompok yang akan dijadikan pionir untuk POKMASWAS

		komunitas					
		4.1.2 Disseminasi rencana kepatuhan untuk perikanan tuna	PSDP, DKP Provinsi & Kabupaten / POKMAS, associations			Belum dilaksanakan sepenuhnya	Belum teridentifikasi kelompok yang akan dijadikan pionir untuk POKMASWAS
		4.1.3 Perusahaan mengembangkan kebijakan yang memastikan adopsi dan implementasi dari rencana tersebut	Perusahaan			Belum dilaksanakan sepenuhnya	Belum teridentifikasi kelompok yang akan dijadikan pionir untuk POKMASWAS
4.2. Memperkuat legislasi pada sanksi	pelanggaran yang sudah ada untuk diperhitungkan dalam proses langkah pengelolaan pada perikanan (EEZ, archipelagic dan coastal)	4.2.1 Memfasilitasi pemerintah dalam memperbaiki sanksi dari peraturan, memperbaiki mekanisme pengawasan, dan penegakan pelanggaran hukum	PSDP/MMAF Legal Department			Belum dilaksanakan sepenuhnya	Peraturan terbaru terkait pelaksanaan pengawasan dan hukuman yang akan diberikan belum tersedia

		4.2.2 Sosialisasi dari legislasi mengenai sangsi untuk pemangku kepentingan dari perikanan ikan karang	PSDP/MMAF Legal Department, associations			Belum dilaksanakan sepenuhnya	Peraturan terbaru terkait pelaksanaan pengawasan dan hukuman yang akan diberikan belum tersedia
		4.2.3 Perusahaan mengembangkan kebijakan mengenai implementasi dari legislasi	Perusahaan			Belum dilaksanakan sepenuhnya	Peraturan terbaru terkait pelaksanaan pengawasan dan hukuman yang akan diberikan belum tersedia
4.3. Proses edukasi bagi nelayan untuk langkah pengelolaan untuk spesies target, reduksi bycatch, dan konsekuensi dari interaksi ekosistem	Diperluas ke jaringan POKMASWAS. Membutuhkan pembelian yang cukup dari pengepul dan pengolah.	4.3.1 Pelatihan mengenai langkahlangkah pengelolaan (cth: spesies target, reduksi bycatch, dan konsekuensi dari interaksi ekosistem) untuk nelayan: - menggunakan BMP untuk praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan - menggunakan BMP untuk meningkatkan	PSDP, BPSDM KP, SDI, P4KSI, KAPI, DKP Provinsi & Kabupaten, Prosesor, pengepul dan WWF			<p>Pelatihan BMP Tuna Handline, Sendangbiru, 2 November 2015</p> <p>Peserta yang hadir merupakan nelayan, Pengepul, KUD Minajaya Sendangbiru, pengawas perikanan, Polair, dan Satuan tugas angkatan laut. Dengan jumlah total peserta pelatihan (berdasarkan absensi) sebanyak 27 orang.</p> <p>Info mengenai kegiatan dapat dilihat di: http://www.seafoodsavers.org/news/read/Langkah-awal-PT-Hatindo-Sukses%20Makmur-dan-PT-168-Benoa-Sebagai-Anggota-Seafood-Savers</p>	Perusahaan atau pengepul harus memastikan praktik perikanan di lapangan menerapkan aktivitas yang disampaikan dalam pelatihan. Untuk selanjutnya nanti akan di monitor setelah setahun dari pelaksanaan pelatihan

		kualitas ikan agar mengurangi overfishing - menggunakan BMP untuk mitigasi bycatch - Catatan keterlacakan				
		4.3.2 Memastikan nelayan melaksanakan aktivitas penangkapan ikan yang berkelanjutan, sesuai dengan materi pelatihan 4.3.1	Perusahaan			Pelatihan Tuna BMP telah dilaksanakan. Memastikan akan penerapan langkah perbaikan dalam BMP oleh pengepul di lapangan
4.4. Memperkuat system pengelolaan berbasis komunitas untuk perikanan handline dan perikanan pesisir lainnya.	Sistem dapat dikatakan telah ada, tetapi membutuhkan penguatan dari fungsifungsi dan dukungan PokMasWas.	4.4.1 Memfasilitasi pembentukan PokMasWas, yang dipersiapkan dengan pengawasan dan rencana monitoring untuk praktik penangkapan ikan (termasuk peningkatan kapasitas dan penguatan	PSDP, DKP Provinsi & Kabupaten, stakeholder			Belum dilaksanakan sepenuhnya Belum teridentifikasi kelompok yang akan dijadikan pionir untuk POKMASWAS

		institusional)					
		4.4.2 Memonitor kinerja PokMasWas sebagai bagian dari sistem pengelolaan	PSDP, DKP Provinsi & Kabupaten, stakeholder			Belum dilaksanakan sepenuhnya	Belum teridentifikasi kelompok yang akan dijadikan pionir untuk POKMASWAS
		4.4.3 Perusahaan mengembangkan kebijakan untuk mendukung pembentukan dan operasional dari PokMasWas	Perusahaan			Belum dilaksanakan sepenuhnya	Belum teridentifikasi kelompok yang akan dijadikan pionir untuk POKMASWAS
4.5. Laporan identifikasi pelanggaran yang terdeteksi dipersiapkan dan tersedia bagi public	Mempersiapkan laporan identifikasi hasil inspeksi aktivitas, terutama aktivitas terkait penangkapan ikan	4.5.1 Memfasilitasi pengumpulan laporan kepatuhan regulasi	PSDP, DKP Provinsi & Kabupaten			Belum dilaksanakan sepenuhnya	Peraturan terbaru terkait pelaksanaan pengawasan dan hukuman yang akan diberikan belum tersedia

		4.5.2 Memfasilitasi pengunggahan laporan ke situs KKP	PSDP, DKP Provinsi & Kabupaten		Belum dilaksanakan sepenuhnya	Peraturan terbaru terkait pelaksanaan pengawasan dan hukuman yang akan diberikan belum tersedia
		4.5.3 Perusahaan mengembangkan kebijakan mengenai pengumpulan data pendukung dan persiapan laporan pelanggaran regulasi	Perusahaan		Belum dilaksanakan sepenuhnya	Peraturan terbaru terkait pelaksanaan pengawasan dan hukuman yang akan diberikan belum tersedia
4.6. Melatih dan memperbaiki efektifitas dari petugas penegakan peraturan dan menambahkan perangkat keras pendukung	Memperbaiki program pelatihan PSDP yang sudah ada, namun diperluas ke partisipasi Provinsi dan kabupaten	4.6.1 Pelatihan pengawasan ke PokMasWas dan PSDP di Provinsi dan Kabupaten	PSDP, DKP Provinsi & Kabupaten		Belum dilaksanakan sepenuhnya	Peraturan terbaru terkait pelaksanaan pengawasan dan hukuman yang akan diberikan belum tersedia
		4.6.2 Memfasilitasi sinkronisasi workplan dengan stakeholder pengawasan lain untuk memperbaiki aktivitas pengawasan dan penegakan	PSDP, DKP Provinsi & Kabupaten, stakeholder		Belum dilaksanakan sepenuhnya	Peraturan terbaru terkait pelaksanaan pengawasan dan hukuman yang akan diberikan belum tersedia

		4.6.3 Company develop policy on supporting enforcement officers work in the field	Perusahaan				Peraturan terbaru terkait pelaksanaan pengawasan dan hukuman yang akan diberikan belum tersedia
--	--	---	------------	--	--	--	---